

Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme Pada Masa Pemerintahan Presiden George W. Bush

Mumtazinur

Dosen Prodi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRACT

This article revisits the foreign policy of United States of America since 9/11 under the governance of George W. Bush. It begins first by describing the linkage between the international security and the international terrorism, and then the influence of hawkish politics to terrorism foreign policy of the United States of America. This article stresses the stance of America in war of terrorism with the military forces and how it affect to create the security for all creatures in the world.

Keywords: *United States of America, terrorism, hawkish, security*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Masalah keamanan merupakan salah satu bentuk khusus dari kajian yang terdapat dalam ilmu politik. Semua isu-isu keamanan merupakan masalah politik, tetapi tidak semua konflik-konflik politik merupakan isu keamanan. Hal ini berarti bahwa jika solusi dari perselisihan dicapai menggunakan persetujuan atau kesepakatan yang berisi peraturan atau prinsip-prinsip atau institusi untuk menyelesaikan masalah mereka atau juga berarti tanpa kekerasan.

Masalah keamanan muncul sebagai sifat sentral dari perselisihan politik dimana para aktor-aktor menggunakan ancaman atau paksaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain.

Peristiwa yang terjadi pada 11 September 2001, menempatkan isu terorisme internasional menjadi agenda sentral dari studi keamanan kontemporer. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa negara juga tidak dapat menjamin penuh keamanan setiap warga negaranya, dengan arti kata negara tersebut bebas dari ancaman dan dapat merasa aman tanpa ancaman apapun dari negara lain.

Dunia internasional memberikan stigma negatif terhadap kehadiran terorisme ini yang sering kali kehadirannya dikaitkan dengan Islam fundamental. Kelompok muslim fundamental ini dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional. Amerika sebagai negara yang paling merasa terancam terhadap kehadiran kelompok-kelompok teroris ini pun kemudian mengambil beberapa langkah preventif. Isu munculnya terorisme dan kaitannya dengan peran Amerika Serikat untuk memberantas terorisme menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam pembahasan yang lebih komprehensif.

Perumusan Masalah

Makalah ini akan mencoba menjawab pertanyaan:1) Bagaimana kaitan antara terorisme internasional dengan keamanan internasional 2) Bagaimana cara Amerika Serikat dibawah Pemerintahan Bush dalam memerangi terorisme

Kerangka Teori

Untuk menjawab pertanyaan dalam pertanyaan permasalahan di atas, makalah ini akan menggunakan teori Graham T. Allison mengenai tiga model analisis konseptual dalam mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut Allison, ada tiga macam model analisis yang dapat digunakan untuk mengkaji pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara.

Pertama, *Rational Policy Model*¹, di mana negara diasumsikan sebagai sebuah aktor tunggal rasional yang membuat keputusan sendiri. Adapun asumsi-asumsi dasar yang berlaku dalam model ini adalah kebijakan merupakan pilihan dari pemerintah nasional yang akan memberikan keuntungan terbesar dan kerugian terkecil dibandingkan beberapa alternatif pilihan lain. Akan tetapi, model ini kemudian mendapat kritik sehubungan dengan penggambaran kerangka analisis yang terlalu menyederhanakan masalah. Meskipun banyak pendapat yang mempercayai negara bergerak sebagai aktor tunggal, hal itu tidak sepenuhnya dapat dibuktikan.

Kedua, *Organizational Process Model*². Dalam model ini, negara diasumsikan sebagai organisasi yang memiliki berbagai organ dengan fungsi berbeda, yang bekerja untuk

¹ Graham T. Allison, "*Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*", dalam S. John Ikenberry. *American Foreign Policy, Theoretical Essays* (3rd edition), (New York: Longman, 1994), hal 415-418

² *Ibid.*, hal. 424-437

mencapai tujuan bersama dari organisasi tersebut. Pada *Organizational Process Model* ini, masalah yang muncul adalah bagaimana sebuah keputusan yang diambil berdasarkan *standard operating procedures* dalam pemerintahan cenderung diasumsikan *predictable* dan tetap sesuai pola aksi tertentu. Padahal rumus bahwa kebijakan bergerak secara linear masih merupakan hipotesis empiris, dan dalam bentuk linear sekalipun, perilaku negara masih dinilai cukup kompleks³.

Ketiga, *Bureaucratic Politics Model*⁴. Model ini mengkonsentrasikan diri kepada *intergroup bargaining*, *balances of power*, dan jalur yang telah ditentukan dalam konteks politik birokrasi. Menurut model ini, keputusan lahir melalui konfrontasi dan *bargaining* dari berbagai pemain. Hasil kebijakan luar negeri merupakan hasil dari negosiasi dari pemimpin-pemimpin tersebut di mana model ini secara langsung menolak asumsi ide pemerintah yang tunggal. Permasalahan dari model ketiga ini adalah, menurut Bendor dan Hammond, model ini terkesan mengenyampingkan peran hierarki dalam *bureaucratic bargaining*, sehingga Bendor dan Hammond kemudian menyarakankan penggunaan status hierarkis dari masing-masing aktor dan kekuatannya dalam pengambilan keputusan.

Dalam menganalisa masalah pengambilan kebijakan terhadap 'perang terhadap terorisme' ala Bush, penulis akan memfokuskan pembuatan kebijakan tersebut pada model III yang disampaikan Allison, yaitu model politik birokrasi. Adapun menurut penulis, model politik birokrasi merupakan model yang paling relevan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam memberantas terorisme menurut pandangan Bush. Model ini senada dengan anggapan bahwa tindakan pemerintah Amerika Serikat terkait dengan keputusan kebijakan luar negerinya, lahir dari kepentingan dan perilaku dari berbagai kelompok dan individu di masyarakat Amerika, dalam hal ini contohnya pengaruh dari kelompok *hawkish*. Politik domestik di Amerika Serikat, perilaku publik, dan lingkungan internasional sama-sama berperan untuk membentuk tindakan dan keputusan pemerintah AS.

Selain itu dalam buku *Bureaucratic Politics and Foreign Policy*, terlihat bagaimana politik birokrasi juga dipengaruhi oleh kekuatan masing-masing entitas politik. Lebih

³ Jonathan Bendor, dan Thomas H. Hammond, "Rethinking Allison's Models" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 86, No. 2 (Jun., 1992), Hal 310.

⁴ Allison, *op.cit.*, hal. 437-443.

lanjut lagi, hal ini senada dengan pendekatan *agency-based* dan pendekatan *interpretative actor* dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Pendekatan *agency-based* mengatakan bahwa karakteristik seorang pemimpin yang tersusun dari kepercayaan, motivasi, dan *interpersonal style* akan berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Model politik birokratis juga mengatakan bahwa pembuatan kebijakan luar negeri bergantung pada permainan tawar-menawar dan preferensi kepentingan para birokrat⁵. Pembuatan kebijakan perdagangan AS itu juga senada dengan pendekatan *interpretative actor* yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara bergantung pada bagaimana individu pemilik kekuasaan mengamati dan menganalisa situasi domestiknya⁶.

Dari kesemua pendekatan dan model yang disampaikan Allison tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, unsur domestik baik itu berupa nilai-nilai yang dianut pemimpin, kepentingan para birokrat, sampai pada cara pemimpin menganalisa situasi domestik sangat berpengaruh.

Hipotesa

Berdasarkan pada permasalahan dan kerangka teori di atas, hipotesa yang dapat diambil adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dibawah Bush untuk memberantas terorisme dengan kekuatan militer yaitu pengaruh dari kelompok *hawkish* anggapan Amerika sebagai 'polisi' dunia yang bertugas menjaga keamanan internasional.

PEMBAHASAN

Kaitan antara terorisme internasional dan keamanan internasional

Istilah Teror dan Terorisme mulai populer abad ke-18, meski sesungguhnya fenomena aksi terror dan terorisme bukanlah hal baru. Menurut Grant Wardlaw dalam buku *Political Terrorism* (1982), manifestasi Terorisme sistematis muncul sebelum Revolusi Perancis, tetapi baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Bahkan suplemen kamus yang dikeluarkan Akademi Perancis tahun 1798, terorisme lebih diartikan sebagai sistem

⁵ Walter Carlsnaes, "*Foreign Policy*" dalam *Walter Carlsnaes, et.all (ed.), Handbook of International Relations*. (London: Sage Publications, 2002), hal. 338.

⁶ *Ibid*, hal. 341.

rezim teror. Terorisme yang berasal dari Bahasa Perancis *le terreur* semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis selama empat tahun dua bulan yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata Terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia. Dengan demikian kata Terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah. (sejarah terorisme, Wikipedia)⁷.

Salah satu masalah mendasar dalam studi terhadap terorisme ini adalah ketiadaan definisi yang jelas mengenai terorisme. Usaha pertama kali untuk mendefinisikan terorisme muncul dari Liga Bangsa-Bangsa (*league of nations*) tahun 1937 yaitu *'all criminal acts directed against a state....and intended to create a state of terror in the minds of particular persons or the general public'* (quoted in Laqueur, 2003)⁸. Dikarenakan ketiadaan dukungan dari anggota-anggota, proposal ini pun gagal untuk diratifikasi.

Departemen Negara Amerika Serikat secara luas mendefinisikan terorisme sebagai *'as premeditated, politically motivated violence against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience; this specifies that the act must be political in motivation and directed against non-combatants'* (2002; xvi).

Wilkinson (1976) mengidentifikasi ada beberapa point yang dapat menjadi karakteristik dari terorisme yang dapat membedakannya dari bentuk kekerasan lainnya, yaitu⁹ : 1.) Sistematis penggunaan pembunuhan, luka-luka / kerugian, atau ancaman untuk mencapai tujuan akhir, contoh penekanan pemerintah, kegiatan revolusioner, atau pengenalan. 2) Fokus, arah, dan tujuan terorisme adalah untuk menciptakan ketakutan, ketidaknyamanan dan panik. 3) Terorisme tidak terpisahkan secara acak dan tidak pandang bulu. 4) Terorisme menggunakan metode penghancuran liar/acak seperti bom mobil, bom paku, dan bom ganda adalah yang paling disukai. Terorisme tidak mengenal aturan atau kebiasaan berperang. 5) Terorisme lebih bersifat ekspresif dari kekerasan, begitupun, terorisme membutuhkan pendengar dan media. Tanpa media, teroris

⁷ Muhammad Kurniawan BW," Jihat Vs Terorisme" , online, <http://www.muslimdaily.com>, diakses tanggal 31 Mei 2010

⁸ W. Laqueur, *No End to War : Terrorism in the Ternty First Century*, New York : Continuum, 2003

⁹ P. Wilkinson, *Political Terrorism*, London: Macmillan, 1976.

merupakan latihan yang sia-sia. 6) Tindak pidana terorisme direncanakan dengan baik dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan secara spontan oleh pelaku tindak pidana.

Isu kemunculan kelompok-kelompok teroris seringkali dihubungkan dengan keamanan internasional. Kehadiran kelompok garis keras ini dianggap dapat menciptakan instabilitas bagi keamanan dunia internasional. Bentuk-bentuk aksi yang sering kali berupa kekerasan merupakan salah satu bukti nyata yang menimbulkan kepanikan bagi semua masyarakat di seluruh dunia. Untuk lebih jelas kita telaah dulu sejenak mengenai konsep dari keamanan internasional.

Kajian keamanan sudah berubah melalui dua peristiwa besar yaitu akhir dari perang dingin dan serangan teroris terhadap Amerika pada tahun 2001¹⁰. Selama perang dingin, teori-teori akademik mengenai keamanan dan konflik internasional didasarkan pada dua dominasi kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pasca Perang dingin, konsep baru mengenai keamanan tidak hanya didasarkan pada keamanan militer semata tetapi juga pada aspek politik, sosial dan ekonomi.

Serangan teroris terhadap Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 2001 yang lalu menegaskan bahwa sumber ancaman sekarang ini tidak hanya berasal dari negara-negara tetapi juga dapat berasal dari luar negara seperti kelompok-kelompok teroris. Hal ini membuktikan lebih lanjut bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat memberikan jaminan keamanan dan terbebas dari ancaman apapun. Segala macam bentuk ancaman dan teror dapat hadir kapan saja dan kepada negara manapun di dunia tanpa pandang bulu.

Segala bentuk aksi apapun yang bersifat teror, kekerasan, intimidasi, dan lain sebagainya dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap kemanan internasional. Kemanan internasional dapat diartikan sebagai adanya rasa aman bagi seluruh penduduk dunia dari segala macam bentuk ancaman yang hadir. Kemanan juga erat kaitannya dengan *Human Security* atau keamanan manusia.

Human Security berarti 'safety for people from both violent and non-violent threats. It is a condition or state of being characterized by freedom from pervasive threats to people's right, their

¹⁰ Craig A.Synder, *Contemporary Security and Strategy*, New York : Palgrave Macmillan, 2008, hal.1

safety, or even their lives' (Commission on Human Security, 2003) ¹¹. Bersandar pada pengertian ini, jelas terlihat bahwa tindakan terorisme menimbulkan *Human Insecurity*. Aksi terorisme yang bersifat mengancam dan kekerasan tak jarang menimbulkan rasa trauma berkepanjangan bagi para korban.

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat kita lihat kaitan yang jelas antara aksi terorisme internasional terhadap kondisi keamanan internasional. Aksi terorisme bersifat indiskriminasi dan tidak ada negara yang dapat menghindarkan diri dari ancaman terorisme. Aksi-aksi yang dilancarkan menimbulkan instabilitas terhadap keamanan dunia dan tak jarang mengganggu arus perekonomian dunia, kepanikan dan kekhawatiran. Sangat sulit untuk tidak mengaitkan langsung tindakan terorisme terhadap kondisi keamanan internasional, mengingat aksi ini secara tidak langsung akan mengancam keamanan manusia (*human security*).

Politik dan Kelompok Hawkish

Amerika Serikat yang saat ini berada dibawah pemerintahan George W. Bush cenderung bersikap represif. Kebijakan AS pada masa pemerintahan George W. Bush sangat dipengaruhi oleh lobi Yahudi dan kelompok-kelompok Neo-Konservatif. Kelompok yang juga dikenal sebagai kelompok neokons ini memiliki warna kebijakan yang cenderung represif dan militeristik.

Kebijakan luar negeri AS pada masa pemerintahan George W. Bush mempunyai motif dan tujuan untuk merebut dominasi ekonomi global dan juga Isu pemberantasan terorisme internasional sebagai mega proyek Pemerintah AS dalam rangka menjadikan negaranya paling survive di dunia. Namun, ternyata tindakan ini tidak lantas membuat negara adidaya ini luput dari berbagai ancaman dan teror.

Dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Bush mengenai usaha untuk memberantas gerakan terorisme selalu tak dapat dilepaskan dari peran kaum *Hawkish* (neokons). Kelompok ini dikenal bersifat agresif, dan suka perang, seperti namanya elang (*hawk*). Sifat ini sangat jauh dari keinginan suka damai seperti sifat kebalikannya yaitu merpati (*dovish*).

¹¹ Department of Foreign Affairs and International Trade, *Human Security : Safety for People in a Changing World* (Ottawa: Department of Foreign Affairs and International Trade,1999)

Dalam kebijakannya untuk memberantas terorisme yang mendapat pengaruh dari kaum *hawkish*, Bush mempunyai strategi yang dikenal sebagai "4D"¹². Strategi ini terdiri dari usaha-usaha untuk mengalahkan (*defeat*), menolak (*deny*), mengurangi (*deminish*), dan mempertahankan (*defend*). Perumusan strategi "4D" ini segera diberlakukan bagi negara-negara yang diduga 'sarang' teroris yaitu diwilayah Asia Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Asia Tengah sampai ke wilayah Eropa.

Kebijakan baru ini memerlukan pemamfaatan menyeluruh dari semua kegiatan pemerintah yaitu, diplomasi, ekonomi, militer, keuangan, penegakan, hukum, dan intelijen. Usaha ini ditujukan untuk menurunkan derajat ancaman teroris menjadi ancaman kriminal. Usaha yang komprehensif ini kemudian menggeser fokus Politik luar negeri Amerika Serikat dari tantangan geopolitik global menuju kearah perang terhadap terorisme.

Politik hawkish semacam ini dan unilateralisme yang sangat mencuat pada serangan terhadap Irak pada 2003 tampaknya telah menjadi semacam trademark dari pola kebijakan luar negeri AS di bawah pemerintahan George W Bush. Kondisi inilah yang harus dipahami oleh masyarakat global dalam menentukan langkahnya.

Kebijakan Pemerintahan Bush dalam Memerangi Terorisme Internasional

Setelah perang dingin berakhir, arah politik luar negeri Amerika Serikat cenderung bergerak ke arah yang hegemonik, yaitu memperluas dan mengkosolidasikan kekuatannya untuk membentuk suatu sistem internasional yang sesuai dengan kepentingan negaranya (*national interest*). Serangan teroris yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 yang lalu semakin menjadi pendukung yang lebih besar bagi politik luar negerinya yang hegemonik tersebut¹³.

Serangan yang menghancurkan pusat-pusat penting perekonomian Amerika beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa negara yang notabene sehebat Amerika pun tak luput dari ancaman. Hal ini mungkin juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan beberapa kelompok tertentu akan hegemoni dan dominasi Amerika di antara negara-negara lain di dunia.

¹² The White House, *National Strategy for Combating Terrorism*, Februari 2003, hal.11-12

¹³ Ashley J. Tells, "Assesing America's on War Terror : Confronting Insurgency, Cementing Primacy", NBR Analysis , 2004, hal.9

Dalam merespon terorisme, kalkulasi kebijakan keamanan, pertahanan, dan luar negeri Amerika Serikat dapat dikatakan berubah secara signifikan, yang pada gilirannya telah mempengaruhi konstelasi politik internasional¹⁴.

Pertama, dengan sikapnya yang keras, AS tampaknya ingin melahirkan semacam struktur "bipolar" baru yang memperumit pola-pola hubungan antar negara. Pernyataan Presiden George W. Bush, "*either you are with us or you are with the terrorists*," secara hitam putih menggambarkan dunia yang terpecah dalam sebuah pertarungan antara kekuatan baik (*good*) dan kekuatan jahat (*evil*).

Kedua, tragedi 11 September juga telah membuka kemungkinan berubahnya parameter yang digunakan AS dalam menilai sebuah negara. Sekarang ini, AS cenderung lebih hirau kepada masalah terorisme ketimbang isu demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan serangan-serangan teroris di masa depan, AS juga telah mengadopsi sebuah doktrin baru, yakni doktrin *preemption*. Melalui doktrin ini, AS secara sepihak memberikan hak kepada dirinya sendiri untuk mengambil tindakan terlebih dahulu, khususnya melalui tindakan militer unilateral, untuk menghancurkan apa yang dipersepsikannya sebagai kemungkinan ancaman teror terhadap kepentingan AS di mana saja. Doktrin *preemption* tersebut jelas meresahkan banyak negara, dan dapat mengubah tatanan, nilai dan norma-norma hubungan antarnegara secara fundamental.

Kebijakan Bush yang cenderung bersifat represif dan penggunaan kekuatan militer pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra dalam dunia internasional termasuk internal Amerika sendiri. Invasi yang dilakukan tidak lama setelah serangan 9/11 ke Afganistan didasarkan atas kebijakan Bush untuk 'menghukum' para teroris ini, namun di lain sisi menimbulkan kritik dari berbagai pihak.

Isu penegakan demokrasi menjadi salah satu alasan utama invasi Amerika Serikat ke beberapa negara muslim pada waktu lalu salah satunya Irak. Demokrasi dianggap sebagai

¹⁴ Bantarto Bandoro , "Masalah masalah Keamanan Internasional Abad 21", makalah pada seminar " Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan" Denpasar, 14-18 Juli 2003,hal. 4

salah satu instrument efektif untuk pencegah pertumbuhan kekuatan Islam yang 'jahat'¹⁵. Padahal pemaksaan terhadap demokrasi ini di lain sisi semakin memperkuat fundamentalisme militeristik yang sudah ada sebelumnya. Demokrasi bukan sesuatu yang dapat dipaksakan, namun hal itu harus melalui proses dan kesiapan dari semua masyarakat.

Proses mendemokratisasikan negara-negara tersebut menggunakan kekuatan militer dinilai tidak akan cukup efektif. Tidak jarang penggunaan kekuatan militer ini memakan banyak korban dari pihak sipil. Hal ini secara tidak langsung menghilangkan eksistensi dari hak asasi manusia itu sendiri. Terorisme bukanlah kelompok yang mudah untuk dideteksi. Perang terhadap terorisme berbeda dari perang konvensional. Tidak ada satuan militer yg tersusun yg ada hanya sejenis laskar-laskar yg garis komandonya tidak jelas. Sebagai gerilya kaum teroris tidak terikat bergerak di dalam batas-batas wilayah negara. Operasi mereka terdapat di suatu lokalitas tetapi pada lain kali mereka akan melakukan operasi yg bersifat trans-nasional. Tidak ada batas-batas wilayah operasi yg jelas tidak ada pertempuran yg bersifat frontal-konvensional.

Kebijakan Pemerintah AS tersebut yang cenderung menggunakan instrumen militeristik ketimbang bermusyawarah antar sesama berakibat mempersubur tumbuhnya gejala fundamentalisme, terutama di negara-negara Islam Timur Tengah. Fenomena fundamentalisme Islam Timur Tengah dibuktikan salah satunya oleh gerakan Hamas di Palestina yang selalu menjadi perbincangan hangat di berbagai media, terutama media Eropa-Amerika. Perjuangan kelompok Hamas bukanlah seperti fundamentalisme yang muncul pada semua keyakinan agarna sebagai respon atas masalah-masalah yang diakibatkan modernitas. Fundamentalisme mereka juga tidak bisa diidentikkan dengan istilah terorisme yang umumnya "dipaksakan" pengertiannya oleh AS dan Barat, tetapi gerakan Hamas merupakan perlawanan terhadap sikap dan tindakan AS-Israel yang menindas.

Perang terhadap teroris adalah perang yg bersifat *low intensity conflict* yg harus dihadapi dengan strategi operasi dan taktik khusus berhadapan dengan gerombolan teroris. Kekuatan represif menggunakan kekuatan militer tidak seharusnya menjadi alternatif terbaik. Kalau kebijakan AS dalam menghadapi terorisme masih dilakukan

¹⁵ Graham E. Fuller, " *Islamic Fundamentalism in the Northern Tier Countries : An Integrative View*", Santa Monica : RAND Corporation, 1991

dengan Cara-cara yang represip, maka nasib dunia di masa mendatang akan semakin tidak aman dan fundamentalisme Islam akan semakin subur sebagaimana contoh kelompok Hamas di Palestina.

KESIMPULAN

Terorisme telah menjadi ancaman berskala internasional, mempengaruhi berbagai macam negara mulai dari Italia, Jerman, Jepang, Yunani, Israel/Palestina, Mesir, Yaman, dan lain sebagainya. Para teroris menargetkan penduduk-penduduk setempat, seringkali dengan mengatasnamakan kelompok-kelompok nasionalis atau pemerintah. Pada tahun-tahun terakhir, kelompok-kelompok radikal ini telah memadukan nasionalisme, etnisitas, atau suku dengan agama dan menggunakan kekerasan dan tindak terorisme untuk mencapai tujuan mereka.

Pasca tragedi 11 September 2001 lalu, Amerika Serikat di bawah pemerintah George W. Bush mengambil langkah preventif yang menekankan penggunaan kekuatan militer. Kebijakan Bush yang dinilai terlalu menindas ini pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat dunia. Kebijakan penggunaan kekuatan militer ini dinilai tidak akan menyelesaikan masalah, malahan akan menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks.

Satu hal yang menjadi nilai penting dan harus dipahami oleh negara manapun yang ingin menggunakan kekuatan militer tidak terkecuali Amerika Serikat yaitu, kita tidak akan dapat mengalahkan terorisme global semata-mata dengan kekuatan militer maupun ekonomi. Diplomasi publik harus menjadi komponen penting dalam kasus ini.

Kekuatan militer mungkin hanya dapat memuaskan secara emosional saja, akan tetapi dalam jangka panjang akan terbukti tidak efektif dan menambah radikalisme dan anti-Amerikanisme yang lebih besar lagi. Memberantas terorisme harus memahami bagaimana asal usulnya, bagaimana ia tumbuh dan menyebar, dan kemudian baru mengambil tindakan.

Terorisme Global akan terus mengancam dunia internasional sampai kita menangani sebab-sebab politik dan ekonomi. Sebab-sebab yang bagaimanapun akan terus menjadi lahan subur bagi kebencian dan radikalisme, tumbuhnya gerakan-gerakan ekstrimis yang dapat melahirkan Osama-Osama lainnya. Keamanan dunia membutuhkan bantuan semua kalangan, baik dari peradaban barat maupun peradaban Islam untuk hidup dan tumbuh bersama. Tanpa ini semua harapan akan perdamaian dunia tidak akan mungkin tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Allison, Graham T, *Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis*, dalam S. John Ikenberry. *American Foreign Policy, Theoretical Essays* (3rd edition), New York: Longman, 1994
- Carlsnaes, Walter. *Foreign Policy" dalam Walter Carlsnaes, et.all (ed.), Handbook of International Relations*. London: Sage Publications, 2002
- Esposito, John L, *Unholy War*, Yogyakarta : LKIS, 2003
- Fuller, Graham E. *Islamic Fundamentalism in the Northern Tier Countries : An Integrative View*, Santa Monica : RAND Corporation, 1991.
- Laqueur, W, *No End to War : Terrorism in the Ternty First Century*, New York : Continuum, 2003.
- Tibi, Bassam *The Challenge of Fundamentalism : Political Islam and The New World Disorder*, London : University of California Press,Ltd, 2002.
- Tells, Ashley J, *Assesing America's on War Terror : Confronting Insurgency, Cementing Primacy*, NBR Analysis , 2004.

MacFarlane, S.Neil, Yuen Foong Khong, *Human Security and United Nations*, Bloomington, Indiana University Press, 2006.

Synder, Craig A, *Contemporary Security and Strategy*, New York : Palgrave Macmillan, 2008

Wilkinson, P, *Political Terrorism*, London: Macmillan, 1976.

White, Bryan , *Issues in World Politics*, New York : ST. Martin's Press INC,1997.

Artikel Online

Abd Moqsith Ghazali, " Fundamentalisme yang berujung pada terorisme", *online*, <http://www.islamlib.htm.com>, diakses tanggal 31 Mei 2010

Rahmad, " Dilemma Perang Melawan Terorisme", *online*, <http://www.blog.re.or.id>, diakses tanggal 31 Mei 2010

Ramadhian Fadillah, " Terorisme Tidak Hanya Tumbuh dalam Fundamentalisme Islam", *online*, <http://www.detiknews.com>, diakses tanggal 31 Mei 2010

Rosidi, " Fundamentalisme bukan Terorisme" , *online*, <http://www.peradabanalternatif.multiply.com>, diakses tanggal 31 Mei 2010

Muhammad Kurniawan BW, " Jihat Vs Terorisme" , *online*, <http://www.muslimdaily.com>, diakses tanggal 31 Mei 2010

Ikhsan, " Pengaruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam menghadapi terorisme internasional terhadap tumbuhnya fundamentalisme Islam di Palestina", *online*, <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=102618>, diakses tanggal 31 Mei 2010

Jurnal

Jonathan Bendor, dan Thomas H. Hammond, "Rethinking Allison's Models" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 86, No. 2 (Jun., 1992)

The White House, *National Strategy for Combating Terrorism*, Februari 2003

Samuel P. Huntington, " *The Clash of Civilizations*", *Foreign Affairs*, Vol.71 (3)

Department of Foreign Affairs and International Trade, *Human Security : Safety for People in a Changing World* (Ottawa: Department of Foreign Affairs and International Trade, 1999)

Makalah

Bandoro, Bantarto, *Masalah masalah Keamanan Internasional Abad 21*, makalah pada seminar “ *Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan*” Denpasar, 14-18 Juli 2003

Sukma, Rizal, *Kemanan Internasional Pasca 11 September: Terorisme, Hegemoni Amerika Serikat dan Implikasi Regional*, makalah pada seminar “ *Pembangunan Hukum Nasional VIII Departemen Kehakiman dan HAM RI*” Denpasar, 11-13 Juli 2003